

# **BAB I**

## **PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

### **A. KONDISI UMUM**

Secara bertahap krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada tahun 1998 dapat dipulihkan. Di **BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN**, berbagai konflik sosial yang terjadi di Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi dapat diselesaikan dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat konflik baik secara sukarela maupun difasilitasi oleh pemerintah beritikad untuk menciptakan suasana damai sehingga kehidupan sosial ekonomi secara berangsur memulih kembali. Selanjutnya gerakan separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam yang membahayakan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki tahapan penyelesaian; serta aksi separatisme di Papua dan Maluku diupayakan penyelesaiannya secara komprehensif. Dalam hubungan luar negeri terutama dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, permasalahan perbatasan dan pelanggaran wilayah negara Indonesia dapat diselesaikan melalui proses hukum dan diplomasi sehingga tidak memperburuk hubungan antar negara.

Gangguan keamanan dan kejahatan konvensional yang timbul sebagai akibat dari krisis multidimensi semakin dapat dikendalikan. Kejahatan transnasional yang meningkat intensitasnya di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dapat ditangani dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku. Kesemuanya ini merupakan modal yang kokoh bagi terciptanya rasa aman, damai, dan tertib dalam kehidupan masyarakat dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melanjutkan pembangunan nasional.

Di **BIDANG POLITIK**, proses demokratisasi yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini mengubah sistem politik serta peran negara dan masyarakat secara mendasar. Amendemen UUD 1945, disahkannya berbagai peraturan perundangan di bidang politik termasuk peraturan perundangan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, terciptanya format hubungan pusat dan daerah berdasarkan perundang-undangan otonomi daerah, serta adanya konsensus format baru hubungan sipil militer telah mengubah struktur politik ke arah kehidupan politik yang demokratis. Tuntutan masyarakat luas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik serta tuntutan atas hak mengeluarkan pendapat dan aspirasi secara bebas telah menjadi salah satu karakteristik utama dalam kehidupan politik saat ini. Perubahan-perubahan mendasar ini apabila dikelola secara tepat, dapat menjadi modal yang penting dalam melanjutkan proses demokratisasi ke depan.

Dalam **BIDANG HUKUM** terjadi perubahan yang cukup mendasar di bidang ketatanegaraan antara lain dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang merupakan lembaga tinggi negara dan berkedudukan setingkat Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Selanjutnya melalui Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan dibentuk pengadilan niaga untuk membantu kepentingan dunia usaha dalam penyelesaian masalah utang piutang.

Dukungan hukum bagi pembentukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa didorong dengan persiapan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi. Selanjutnya pembinaan empat lingkungan peradilan (peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer) secara bertahap diserahkan kepada Mahkamah Agung sehingga independensi peradilan dalam menyelenggarakan fungsi kehakiman dapat lebih terjaga. Rangkaian kemajuan ini merupakan landasan yang kuat bagi pembangunan hukum selanjutnya.

Di **BIDANG EKONOMI**, stabilitas ekonomi terus meningkat. Sejak memasuki tahun 2002, nilai tukar rupiah relatif stabil dengan kecenderungan menguat, laju inflasi dan suku bunga menurun, serta cadangan devisa meningkat. Dalam tahun 2003, rata-rata kurs harian rupiah mencapai Rp 8.578,- per dolar AS atau menguat 8,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya; laju inflasi menurun menjadi 5,1 persen; serta suku bunga SBI 1 bulan turun menjadi 8,3 persen.

Kinerja sektor eksternal juga membaik. Dalam keseluruhan tahun 2003, penerimaan ekspor meningkat menjadi US\$ 61,0 miliar didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang naik masing-masing sebesar 12,6 persen dan 5,2 persen. Dalam tiga triwulan pertama tahun 2003, surplus neraca transaksi berjalan mencapai US\$ 5,9 miliar serta defisit neraca transaksi modal dan finansial menurun menjadi US\$ 246 juta. Pada akhir Desember 2003, cadangan devisa meningkat menjadi US\$ 36,2 miliar atau US\$ 4,7 miliar lebih tinggi dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Stabilitas ekonomi yang meningkat juga tercermin dari ketahanan fiskal yang tetap terjaga. Dalam tahun 2003, defisit anggaran dan stok utang pemerintah mencapai 2,0 persen dan 66,4 persen dari PDB. Rangkaian kemajuan ini mendorong keyakinan untuk mengakhiri program kerja sama dengan IMF pada akhir tahun 2003.

Dalam pada itu, di **BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH** terjadi perubahan yang cukup mendasar pada tata pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah melakukan reorganisasi kelembagaan, penempatan sumber daya manusia aparatur Pemda, pengelolaan keuangan daerah, dan pengembangan kapasitas anggota legislatif di daerah.

Beberapa daerah secara aktif mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh. Dengan keterbatasan yang ada, beberapa wilayah tertinggal di sejumlah daerah ditangani melalui skema pengembangan permukiman transmigrasi; berbagai pembangunan sarana dan prasarana serta usaha ekonomi produktif berbasis kelompok masyarakat dikembangkan di perdesaan dan perkotaan; berbagai program pembangunan dilanjutkan, termasuk program penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh di perkotaan diteruskan; serta berbagai peraturan pelaksanaan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang dihasilkan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, program rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan terus dikembangkan; serta perlindungan bagi sumber daya alam yang masih dalam keadaan baik dilanjutkan. Walaupun hasilnya masih sangat terbatas, program rehabilitasi hutan dan lahan kritis telah dikembangkan sebagai suatu gerakan nasional; demikian pula gerakan nasional pembangunan kelautan dan perikanan yang secara serentak dan terpadu dilakukan

di seluruh daerah pada wilayah pesisir, laut, dan perairan tawar potensial. Di samping itu, upaya pencarian cadangan-cadangan tambang baru terus dilanjutkan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan, antara lain melalui peningkatan teknologi proses pengolahan hasil tambang dan perbaikan kerusakan lingkungan di areal bekas penambangan. Membaiknya tingkat kesadaran masyarakat tentang arti penting lingkungan hidup meningkatkan keserasian hubungan antara kebutuhan manusia dan kemampuan ekosistem dalam mendukung kehidupan guna menghindari kerusakan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih besar.

Meskipun sejak krisis ekonomi perhatian lebih besar diberikan pada upaya untuk menciptakan stabilitas moneter dan ketahanan fiskal serta pembangunan infrastruktur dihadapkan pada keterbatasan sumber pendanaan yang sebagian besar masih tergantung pada pemerintah sehingga banyak pembangunan infrastruktur yang tertunda dan penyediaan dana untuk pemeliharaan menurun, fungsi **INFRASTRUKTUR** secara umum sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diupayakan tetap dipertahankan.

Di **BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA** (SDM), berbagai upaya peningkatan kualitas SDM telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, tercermin dari membaiknya beberapa indikator kinerja pembangunan seperti kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam pembangunan kependudukan, meskipun jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, laju pertumbuhan penduduk semakin menurun, yaitu dari 2,32 persen pada periode 1971-1980 menjadi 1,49 persen pada periode 1990-2000 (Sensus Penduduk 1990 dan 2000). Keberhasilan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk tercermin dari menurunnya angka kelahiran total (TFR) dari 5,6 anak per wanita usia reproduksi (1971) menjadi 2,6 anak (tahun 2002). Penurunan TFR berkaitan dengan meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi (prevalensi) pada pasangan usia subur yaitu dari kurang 5 persen (1971) menjadi 60 persen (2002).

Menurunnya tingkat kelahiran membawa perubahan pada struktur umur penduduk. Proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) menurun dari 36,6 persen (1990) menjadi 30,4 persen (2000), penduduk usia produktif (15-64 tahun) meningkat dari 59,6 persen menjadi 65,0 persen, dan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,5 persen. Sebagai dampaknya, rasio beban ketergantungan menurun dari 67,8 persen menjadi 53,8 persen, dan struktur umur penduduk Indonesia cenderung semakin menua.

Berdasarkan Susenas 2003, tingkat pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang cukup berarti yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas yaitu dari 6,7 tahun pada tahun 2000 menjadi 7,1 tahun pada tahun 2003, dan meningkatnya proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berpendidikan SLTP keatas menjadi 36,2 persen pada tahun 2003. Membaiknya tingkat pendidikan penduduk sangat dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi pendidikan untuk semua kelompok usia sekolah dan untuk semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2003 angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun mencapai 96,4 persen, penduduk usia 13-15 tahun mencapai 81,0 persen, penduduk usia 16-18 tahun mencapai 51,0 persen dan penduduk usia 19-24 tahun mencapai 11,7 persen. Pada tahun yang sama angka partisipasi kasar (APK) SD/MI mencapai 105,8 persen, APK

SMP/MTs mencapai 81,1 persen, APK SMA/SMU/MA/MAK mencapai 50,9 persen, dan APK PT menjadi 10,8 persen. Sejalan dengan itu angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas juga mengalami peningkatan menjadi 89,8 persen pada tahun 2003.

Kualitas pendidikan terus ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan. Membaiknya tingkat dan kualitas pendidikan penduduk berpengaruh pada kualitas angkatan kerja dengan meningkatnya proporsi angkatan kerja berpendidikan SLTA ke atas. Sementara itu proporsi angkatan kerja lulusan SMP/MTs ke bawah terus menurun yang disebabkan oleh banyaknya penduduk berpendidikan SMP/MTs ke bawah tidak lagi masuk dalam usia angkatan kerja, serta meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga tidak masuk dalam angkatan kerja.

Tingkat kesehatan penduduk meningkat tercermin dari indikator kesehatan seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan keadaan gizi masyarakat. Usia harapan hidup meningkat dari 45 tahun (1967) menjadi 66,2 tahun (2001); angka kematian bayi menurun dari 128 per 1.000 kelahiran hidup (1960) menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (2000), angka kematian balita menurun dari 216 per 1.000 kelahiran hidup (1960) menjadi 46 per 1.000 kelahiran hidup (2000), angka kematian ibu melahirkan menurun dari 450 per 100.000 kelahiran hidup (1986) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (2000); serta angka kurang gizi pada balita menurun dari 37,5 persen tahun 1989 menjadi 25,8 persen tahun 2002.

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak saja penting sebagai sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi, tetapi juga merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia. Tingkat kemajuan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai oleh sumbangannya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang bersifat universal dan spesifik, dan pengembangan pada aspek yang bersifat terapan, dalam bentuk pemanfaatan produk litbang pada skala produksi dan komersial.

Dalam pada itu, **KEBUDAYAAN** yang merupakan modal dasar yang sangat penting sebagai salah satu sumberdaya utama pembangunan. Bangsa Indonesia pernah dikenal sebagai suatu bangsa yang memiliki peradaban terbuka dengan tingkat solidaritas dan kebersamaan yang tinggi. Selain itu, budaya bangsa yang sangat beragam juga mencerminkan kekayaan budaya nasional akan bentuk-bentuk kearifan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keahlian yang bersifat spesifik dan unik.

Di bidang **AGAMA**, kehidupan beragama berkembang dengan baik terutama pada tingkat pelaksanaan ritual keagamaan, yang didukung oleh meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan, sehingga umat beragama lebih mudah melaksanakan ibadahnya. Hal tersebut ditandai dengan semakin tumbuh suburnya kegiatan keagamaan di masjid, surau, gereja, pura, dan vihara; semakin giat dan bergairahnya umat beragama dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing-masing; serta semakin intensifnya pengkajian dan pendalaman agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan keagamaan juga memberikan andil yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infak, sodaqoh, hibah, kolekte, dana punia, dan dana keagamaan lainnya dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan yatim piatu, bantuan bencana alam, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Meskipun telah dicapai kemajuan di berbagai bidang pembangunan, masalah-masalah yang akan dihadapi dalam kurun waktu dua tahun mendatang masih cukup besar yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut.

## **LAMBATNYA REFORMASI**

Kemajuan proses reformasi politik yang telah dilalui dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini masih dirasakan lambat dan belum memenuhi harapan rakyat. Belum mengakarnya perubahan kelembagaan dan demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kendala utama berjalan lambatnya proses demokratisasi di Indonesia. Perubahan yang lambat ini dapat dipahami dengan masih mudanya usia demokrasi di Indonesia yang selama ini baru mencapai tahap infrastruktur demokrasi dengan berbagai kelemahannya. Konsistensi dalam menerapkan berbagai penyempurnaan dan penguatan struktur politik dan proses institusionalisasi nilai-nilai demokratis menjadi kunci keberhasilan proses awal reformasi politik ke depan.

Proses reformasi yang berjalan lambat juga terjadi dalam pembangunan hukum. Meskipun beberapa kemajuan dicapai di bidang hukum, masih banyak didapati produk hukum yang tidak sejalan satu dengan lainnya. Di samping itu juga masih terdapat produk hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan keadaan sehingga menimbulkan stagnasi dan resistensi di dalam penerapannya. Sementara itu terjadi peningkatan apatisme masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap telah meninggalkan nilai-nilai keadilan, diskriminatif, serta kehilangan impartialitas di dalam menangani berbagai kasus. Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum berada pada tahap yang memprihatinkan dan dapat menjauhkan dari upaya untuk mewujudkan supremasi hukum. Selanjutnya rendahnya tingkat kesejahteraan apatur hukum telah menjadi membenaran terjadinya korupsi. Kondisi ini berpengaruh buruk terhadap upaya pembangunan hukum sehingga penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan secara penuh.

Reformasi birokrasi juga belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Memasuki tahun ke tujuh sejak reformasi digulirkan, perbaikan birokrasi pemerintah belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Ini tercermin dari masih tingginya penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tidak efisiennya organisasi pemerintahan di pusat dan daerah, rendahnya kualitas pelayanan publik, dan lemahnya fungsi lembaga pengawasan.

Peran birokrasi yang profesional, yang mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat agar masyarakat mampu melakukan kegiatan lainnya secara mandiri belum nampak. Sementara itu masyarakat sangat mengharapkan pengurangan penyalahgunaan kewenangan serta peningkatan mutu layanan publik yang masih rendah. Tingginya KKN di lingkungan aparatur negara dan rendahnya mutu pelayanan publik telah mengakibatkan semakin hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Persoalan lainnya adalah sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang lemah dengan kompetensi sumber daya aparatur yang rendah. Lemahnya sistem administrasi publik ini telah berakibat pada menurunnya daya saing nasional dalam kompetisi regional maupun internasional. Selain itu masih banyaknya

peraturan perundangan yang tumpah tindih berdampak tidak optimalnya mutu pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu amanat agenda reformasi adalah pemberantasan terhadap semua bentuk KKN. Dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN dalam salah satu arah kebijakan Penyelenggara Negara menyatakan perlunya 'membersihkan penyelenggara negara dari praktik KKN dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat, dan mengembangkan etika dan moral'. Selanjutnya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN serta UU No. 31 Tahun 1999 j.o. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbagai aturan tersebut perlu dijalankan secara lebih tegas dan serius agar berbagai masalah penyalahgunaan kewenangan dapat segera diatasi. Namun hingga tahun ke enam setelah reformasi, kemajuan dalam pemberantasan KKN belum sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.

Merebaknya KKN dalam banyak hal juga disebabkan oleh meningkatnya budaya konsumtif yang didorong oleh lingkungan pembangunan yang berorientasi materi. Perilaku hedonistis tersebut tidak didukung oleh peningkatan kemampuan yang produktif sehingga kesenjangan antara produksi dan konsumsi semakin lebar. Budaya konsumtif yang terlampau kuat mengakibatkan tumbuhnya budaya menerabas yang pada gilirannya menyuburkan budaya KKN dengan meminggirkan etika sosial serta etika berbangsa dan bernegara.

## **RENDAHNYA KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat tercermin dari tingkat pendapatan yang masih rendah, pengangguran yang masih luas serta biaya hidup yang tinggi dan masih sulitnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini makin dipicu oleh kurangnya pemahaman terhadap etos berkarya dan moral yang diajarkan oleh agama, lambatnya pembangunan sumber daya manusia, masih lemahnya daya dorong perekonomian, tingginya kesenjangan antar daerah, menurunnya penyediaan infrastruktur, serta menipisnya sumber daya alam dan menurunnya daya dukung lingkungan.

Meskipun kehidupan beragama berkembang lebih baik, pembangunan **AGAMA** masih dihadapkan pada gejala negatif di tengah-tengah masyarakat yang sangat memprihatinkan, seperti praktik perjudian, perilaku asusila, pengedaran dan pemakaian narkoba, yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Demikian pula ada kecenderungan makin rapuhnya etika dan nilai-nilai agama, yang ditandai oleh perilaku permisif yang tak lagi mengindahkan adab kesopanan dan kesantunan. Gejala tersebut menunjukkan bahwa akhlak mulia menurun dan sendi-sendi moral agama melemah. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas agama itu menggambarkan adanya kesenjangan yang mencolok antara pemahaman atas ajaran-ajaran agama dengan tingkah laku sosial. Selain itu dalam beberapa tahun terakhir muncul ketegangan sosial yang melahirkan konflik antarumat beragama yang bersumber dari sentimen agama yang diartikan secara sempit.

Di bidang **SUMBER DAYA MANUSIA**, permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain adalah masih tingginya kenaikan jumlah penduduk secara absolut. Meskipun telah terjadi penurunan fertilitas yang cukup berarti, namun secara absolut pertambahan penduduk Indonesia meningkat sekitar 3 sampai 4 juta jiwa per tahun. Hal ini disebabkan karena tambahan pasangan usia subur yang dihasilkan dari ledakan kelahiran atau 'momentum demografi' yang terjadi pada tahun 1970-an. Apabila penanganan masalah kependudukan tersebut tidak ditangani dengan baik dapat berakibat pada semakin beratnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Tantangan lain yang dihadapi adalah berkaitan dengan mobilitas dan persebaran penduduk. Pembangunan ekonomi wilayah yang tidak merata mengakibatkan perpindahan penduduk ke wilayah-wilayah yang lebih maju pembangunannya, sehingga kepadatan penduduk terus meningkat terutama di Pulau Jawa dan daerah perkotaan. Sekitar 31 persen penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan pada tahun 1990, dan meningkat menjadi 42 persen pada tahun 2000. Tantangan lainnya adalah belum tertatanya administrasi kependudukan secara nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yang menyangkut data kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

Kualitas SDM Indonesia yang diukur dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi pendidikan dan PDB per kapita riil, masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Berdasarkan *Human Development Report 2003*, IPM Indonesia hanya menempati urutan ke-112 dari 175 negara. Begitu pula menurut Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index, GDI*) Indonesia hanya menempati urutan ke-91 dari 144 negara. Tingkat kemajuan iptek nasional juga masih sangat rendah. Pada tahun 2001 Indeks Pencapaian Teknologi (IPT) Indonesia berada pada urutan ke 60 dari 72 negara.

Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara lebih merata, berkualitas dan terjangkau, yang antara lain ditunjukkan oleh masih tingginya penduduk buta aksara, rendahnya cakupan layanan pendidikan bagi anak usia dini, serta masih rendahnya partisipasi pendidikan terutama untuk jenjang pendidikan menengah pertama sampai dengan pendidikan tinggi, dengan kesenjangan yang masih cukup tinggi antarkelompok masyarakat seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah. Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal dan pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga pendidikan belum dinilai sebagai bentuk investasi. Di samping itu fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama ke atas belum tersedia secara merata khususnya di daerah terpencil dan kepulauan sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak terutama anak perempuan untuk mengakses layanan pendidikan. Fasilitas pendidikan dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai.

Sementara itu kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan pembangunan, yang terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas, belum memadainya ketersediaan fasilitas belajar terutama buku pelajaran dan peralatan

peraga pendidikan, dan belum berjalannya sistem kontrol dan jaminan kualitas pendidikan. Di samping itu sistem pengelolaan pendidikan juga belum sepenuhnya efektif dan efisien yang antara lain ditunjukkan oleh belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi pendidikan, belum berjalannya sistem pengawasan pendidikan, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk partisipasinya dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Kualitas angkatan kerja masih didominasi oleh angkatan kerja lulusan SD kebawah. Pada saat yang sama meningkatnya jumlah angkatan kerja lulusan SLTA dan perguruan tinggi tidak diimbangi oleh meningkatnya ketersediaan kesempatan kerja yang sesuai yang pada gilirannya meningkatkan jumlah penganggur terdidik.

Pembangunan iptek dihadapkan pada permasalahan berupa belum fokusnya kegiatan litbang sehingga belum dapat mencapai hasil yang signifikan. Masalah lain adalah belum tumbuhnya kegiatan litbang di industri, sehingga penelitian yang bersifat terapan dan pengembangan yang seharusnya dapat dilakukan oleh dunia industri, sebagian besar harus ditanggung oleh lembaga litbang pemerintah. Selain itu kebijakan inovasi yang mencakup bidang pendidikan, industri dan iptek belum terintegrasi sehingga mengakibatkan kapasitas yang tidak dimanfaatkan pada sisi penyedia, macetnya sistem transaksi, dan belum tumbuhnya sisi pengguna iptek domestik.

Dalam pembangunan kesehatan, permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk, yang antara lain terlihat dengan masih tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu, serta tingginya proporsi balita yang mengalami gizi kurang; tingginya angka kematian akibat penyakit menular seperti tuberkulosis dan malaria; kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antarwilayah, gender, dan kelompok pendapatan; belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan; dan terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan serta belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan.

Sementara itu pembangunan sosial masih dihadapkan pada permasalahan seperti kemiskinan, konflik sosial, bencana alam, gejala disintegrasi sosial, rawan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, yang berakibat pada meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat rentan lainnya. Tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak, serta partisipasi anak dalam proses pembangunan juga masih rendah. Kebutuhan tumbuh kembang anak belum menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan pembangunan yang belum peduli anak.

Pembangunan pemuda dan olah raga dihadapkan pada masih rendahnya kualitas dan partisipasi pemuda sebagai generasi penerus dan sebagai bagian dari pembangunan penduduk. Di samping itu, minat dan keinginan masyarakat untuk melakukan olahraga semakin menurun yang ditunjukkan oleh menurunnya tingkat partisipasi olahraga masyarakat setiap tahunnya. Kesehatan jasmani masyarakat masih rendah; demikian pula prestasi olahraga.

Di bidang **KEBUDAYAAN**, upaya membangun ketahanan budaya bangsa belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ketahanan budaya bangsa masih rentan karena adanya disorientasi tata nilai, krisis identitas, dan rendahnya daya saing. Di samping itu, dirasakan pula lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keberagaman dan



menegaskan peran kebudayaan untuk meningkatkan kemampuan bangsa secara bersama-sama.

Dalam bidang **EKONOMI**, meskipun terjadi peningkatan stabilitas ekonomi, kegiatan ekonomi belum tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Dalam tahun 2000–2003, perekonomian hanya tumbuh rata-rata sekitar 4,0 persen per tahun; jauh lebih rendah dibandingkan dengan sebelum krisis yang mampu tumbuh rata-rata sekitar 7 persen per tahun. Lambatnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh masih rendahnya investasi serta masih lemahnya kinerja ekspor nonmigas yang pada gilirannya menekan pertumbuhan sektor industri yang selama ini menjadi penggerak pertumbuhan.

Dalam tahun 1999 – 2003, investasi dalam pengertian pembentukan modal tetap bruto hanya tumbuh rata-rata sekitar 1,3 persen per tahun, jauh di bawah pertumbuhan sebelum krisis yaitu rata-rata sekitar 10,6 persen per tahun (antara tahun 1991 – 1997). Dalam kurun waktu yang sama, ekspor nonmigas hanya tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun, jauh di bawah sebelum krisis yaitu rata-rata sekitar 22,6 persen per tahun. Rendahnya kepastian hukum, termasuk tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, iklim ketenagakerjaan yang kurang kondusif, prosedur perijinan yang panjang, administrasi pajak dan kepabeanan yang kurang menunjang, serta kondisi infrastruktur yang tidak memadai, menurunkan peringkat Indonesia sebagai negara tujuan investasi dan sekaligus melemahkan daya saing ekspor nonmigas.

Lambatnya pertumbuhan ekonomi ini mengakibatkan pula rendahnya penciptaan lapangan kerja. Dalam tahun 2002, pengangguran terbuka meningkat menjadi 9,1 juta jiwa (9,1 persen dari total angkatan kerja) sehingga kurang mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Dalam tahun 2002, jumlah penduduk miskin mencapai 38,4 juta jiwa (18,2 persen). Selain itu, pada tahun 2002 jumlah pekerja formal di perkotaan berkurang 0,47 juta orang dan di perdesaan berkurang 1,1 juta orang. Oleh karena itu kebijakan investasi dan ekspor nonmigas perlu diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja.

Di samping berbagai kemajuan yang sudah dicapai, **PEMBANGUNAN DAERAH** dihadapkan pada permasalahan pokok berupa meningkatnya kesenjangan antara Jawa–Luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia–Kawasan Timur Indonesia, serta antara kota–desa. Pertumbuhan yang tidak seimbang antara kota-kota besar/metropolitan dengan kota-kota menengah dan kecil dengan pemusatan ekonomi di Pulau Jawa–Bali serta pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil serta kawasan perdesaan yang berjalan lambat mengakibatkan berbagai kesenjangan tersebut di atas. Di samping itu, kemampuan masing-masing daerah tidak merata dalam kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, pengelolaan keuangan, dan kapasitas anggota legislatif.

Pengembangan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan dihadapkan pada banyaknya wilayah tertinggal yang harus ditangani yang tersebar luas di seluruh pelosok serta panjangnya garis perbatasan darat dan laut antar negara dan banyaknya pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni. Sedangkan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh dihadapkan pada kurangnya kesiapan daerah dalam memanfaatkan peluang yang ada, terbatasnya sumber daya manusia, rendahnya peranan swasta dalam pembangunan, serta terbatasnya jaringan sarana dan prasarana fisik dan ekonomi di daerah.

Kerjasama antardaerah harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesatuan nasional dengan mengoptimal skala ekonomi. Dengan demikian peran pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah terhadap pembangunan nasional akan saling mengisi dan memperkuat.

Peran infrastruktur di samping sebagai penunjang dan prasarana pembangunan, juga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun perekonomian mulai membaik, **PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR** masih banyak dihadapkan pada berbagai kendala sehingga dukungan infrastruktur bagi pembangunan secara nasional masih lemah. Kondisi infrastruktur jalan masih dalam keadaan kritis akibat kurangnya dana rehabilitasi dan pemeliharaan, memburuknya kualitas konstruksi jalan, dan meningkatnya pelanggaran kelebihan muatan. Pada tahun 2002 sekitar 43 persen jaringan jalan dalam kondisi rusak ringan dan berat, termasuk sekitar 15.016 km jalan nasional dan jalan propinsi serta sekitar 100.132 km jalan kabupaten. Kondisi yang sama juga dialami oleh perkeretaapian dan angkutan laut nasional. Kualitas pelayanan dan keselamatan semakin menurun dengan tidak memadainya operasi dan pemeliharaan, serta banyaknya infrastruktur yang telah melampaui umur teknis.

Masalah kelangkaan listrik sudah mulai terasa sejak tahun 2000 dengan kemampuan pembangkit terutama di sistem Luar Jawa-Madura-Bali (JAMALI) yang mengalami defisit akibat tidak adanya pembangunan pembangkit tenaga listrik yang baru karena menurunnya investasi pemerintah, PT PLN, dan swasta. Hal ini diperparah dengan penurunan kemampuan pembangkit karena pengoperasian yang terus menerus dan penundaan jadwal pemeliharaan. Sampai dengan Oktober 2002, jumlah wilayah yang mengalami defisit tenaga listrik mencakup hampir 140 kabupaten di sistem Luar JAMALI.; sedangkan untuk sistem JAMALI cadangan kapasitasnya telah mencapai tingkat yang mengkuatirkan yaitu sekitar 7 persen.

Pembangunan energi dihadapkan pada kendala berupa lambatnya proses restrukturisasi dan reformasi. Berbagai peraturan pelaksanaan UU Minyak dan Gas serta UU Ketenagalistrikan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal. Kelambatan ini berdampak pada berkurangnya investasi di sektor energi. Dalam kaitan itu Badan Pengatur Independen untuk sektor hulu (BP Migas) dan sektor hilir (BPH Migas) disiapkan untuk menghadapi iklim persaingan yang lebih sehat yang saat ini dalam tahap penyiapan perangkat peraturan serta sumber daya.

Lambatnya penyelesaian restrukturisasi menghambat pembangunan infrastruktur telekomunikasi khususnya pembangunan sambungan tetap. Sejak tahun 1999, pertumbuhan sambungan tetap setiap tahunnya sangat rendah, yaitu di bawah 5 persen sehingga pada akhir tahun 2002, tingkat penetrasi sambungan tetap Indonesia masih di bawah 4 persen, jauh di bawah negara-negara Asia lainnya yang telah mencapai 12 persen. Untuk mendorong pembangunan telekomunikasi, pemerintah melakukan terminasi dini hak eksklusivitas PT Telkom dan PT Indosat. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan kompensasi sebagai konsekuensi dari kebijakan terminasi dini dan mereposisi PT Telkom dan PT Indosat sebagai *Full Fixed Network and Service Provider* melalui kebijakan duopoli. Baik pemberian kompensasi maupun penetapan kebijakan duopoli belum dapat meningkatkan penetrasi sambungan tetap ataupun menciptakan kompetisi yang sehat antara lain disebabkan oleh belum lengkapnya peraturan pendukung kompetisi, kurang

tegasnya sikap terhadap penyelenggara, serta kurang jelasnya pemisahan peran pemerintah dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Penyediaan infrastruktur terkait dengan pendayagunaan sumberdaya air terutama untuk penyediaan air irigasi masih memerlukan perhatian besar. Lebih dari 31 persen jaringan irigasi membutuhkan rehabilitasi terutama di daerah-daerah penghasil beras nasional di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sementara itu fleksibilitas pemanfaatan sumber dana sangat terbatas karena merupakan pinjaman proyek yang bersumber dari luar negeri. Infrastruktur pengendalian daya rusak air terutama untuk pengendalian banjir juga masih belum memadai sehingga di beberapa daerah, bencana banjir menghambat kegiatan ekonomi dan menimbulkan kerusakan baik di permukiman maupun fasilitas publik. Selain itu, kapasitas tampung bangunan penampung air seperti waduk dan bendungan semakin menurun akibat peningkatan sedimentasi sehingga keandalan penyediaan air baik untuk irigasi maupun air baku menjadi menurun.

Ketersediaan air minum diperkotaan dan di perdesaan masih sangat rendah; baru sekitar 34 persen masyarakat yang mendapat pelayanan air minum (diperkotaan baru mencapai 39 persen dan diperdesaan baru 8 persen) dan 75 persen yang memiliki pelayanan air limbah.

Upaya pemenuhan kebutuhan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih jauh dari memadai. Pada tahun 2000, jumlah rumah yang tersedia mencapai 45,6 juta unit dari total rumah tangga sebanyak 51,5 juta tetapi bila dilihat dari tingkat kelayakannya jumlah rumah yang layak huni hanya mencapai 31,4 juta unit; sehingga terdapat akumulasi defisit/*back-log* yang pada tahun 2003 telah mencapai 5,9 juta unit. Sementara itu laju pertumbuhan kebutuhan perumahan baru pada saat ini mencapai 800 ribu per tahun. Rendahnya kemampuan penyediaan serta rendahnya kemampuan atau daya beli masyarakat menyebabkan upaya pemenuhan kebutuhan perumahan yang ada dipenuhi oleh masyarakat sendiri secara swadaya dengan tanpa pengaturan dan pengendalian, yang pada akhirnya berdampak terhadap penambahan luasan permukiman kumuh. Pada tahun 1996 luas kawasan kumuh mencapai 40 ribu ha dan meningkat pada tahun 2000 menjadi lebih dari 47,5 ribu ha yang tersebar di lebih 10 ribu lokasi dan dihuni oleh 17,2 juta jiwa.

Meningkatnya kegiatan ekonomi menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa, terutama yang disediakan alam dan memberi dampak negatif pada ketersediaan **SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**. Kecenderungan ini tercermin dari meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan tekanan terhadap keberadaan sumber daya alam. Hal ini berpengaruh pada penurunan kualitas (degradasi) dan kuantitas (depleksi) sumber daya alam, yang pada akhirnya menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan rakyat.

Laju deforestasi meningkat pesat yaitu dari 1,6 juta ha/tahun pada awal tahun 1990an menjadi sekitar 2,4 juta ha/tahun setelah tahun 1998, sementara kemampuan merehabilitasi jauh dari angka deforestasi tersebut. Demikian pula konversi lahan pertanian untuk penggunaan lain seperti permukiman dan industri juga semakin tidak terkendali yang setiap tahunnya diperkirakan mencapai sekitar 50 ribu ha. Ditambah lagi dengan semakin meningkatnya kasus-kasus pencemaran sebagai dampak dari perkembangan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih. Keadaan ini akan

memicu terjadinya berbagai krisis kelangkaan sumber daya, khususnya krisis sumber daya pokok bagi kelangsungan kehidupan yaitu krisis pangan, air, dan energi.

Kondisi tersebut juga sangat dipengaruhi oleh penambahan penduduk yang pesat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi dengan penerapan yang tidak ramah lingkungan, dan kurangnya etika dan perilaku yang berpihak pada kepentingan pelestarian lingkungan. Ketiga faktor tersebut akhirnya menyebabkan penerapan iptek lebih dimanfaatkan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan lingkungan. Kerusakan yang terjadi tidak hanya terbatas pada fisik tetapi juga mengarah pada lingkungan sosial dan budaya, seperti kemiskinan, kelaparan, pelanggaran HAM, dan kepunahan nilai-nilai budaya masyarakat.

## **MASIH ADANYA POTENSI DISINTEGRASI BANGSA**

Sementara itu potensi disintegrasi bangsa masih mewarnai dinamika sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen terhadap bangsa dan negara yang belum sepenuhnya utuh, primordialisme, serta pemahaman yang sempit terhadap otonomi daerah berpotensi sebagai faktor munculnya benih-benih disintegrasi bangsa yang apabila tidak dikelola dengan baik sangat mungkin mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, berbagai kebijakan pemerintah yang kurang memberikan rasa kebersamaan dan keadilan kepada daerah-daerah, kurang meratanya hasil pembangunan, penanganan konflik bernuansa SARA yang memihak kepada salah satu kelompok yang bertikai, atau tidak terakomodasinya aspirasi daerah dapat meningkatkan akumulasi ketidakpuasan dan mendorong ketidakpatuhan kepada pemerintah pusat.

Rendahnya kemampuan pemerintah untuk membangun dan membina daerah perbatasan, saat ini masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Kurang menyentuhnya kegiatan pembangunan di daerah perbatasan yang berdampak pada rendahnya tingkat kemakmuran masyarakat, menjadikan masyarakat daerah perbatasan merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Minimnya pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara pada daerah perbatasan, menjadikan sebagian masyarakat di daerah perbatasan merasa bukan bagian dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua kondisi ini telah menurunkan rasa nasionalisme dan menumbuhkan keinginan sebagian masyarakat di daerah perbatasan untuk menjadi warga negara tetangga dengan cara memindahkan patok tapal batas. Di Kalimantan Barat terjadi pemindahan patok tapal batas yang cukup memprihatinkan dan telah mencapai 8 kilometer menjorok ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, meskipun ancaman invasi militer dapat dikatakan tidak akan terjadi, namun instabilitas regional di sekitar Indonesia yang antara lain disebabkan oleh ketidakpastian peta kekuatan militer dunia dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terjadinya krisis identitas bersamaan dengan rendahnya daya saing hasil karya bangsa telah mengakibatkan semakin melemahnya rasa kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai suatu bangsa. Kondisi ini lebih jauh telah menyuburkan sikap inferioritas dan sikap ketergantungan. Hal tersebut tercermin antara lain dari menurunnya apresiasi masyarakat

terhadap hasil karya dan kekayaan budaya nasional. Di samping itu, menipisnya semangat nasionalisme tersebut juga sebagai akibat dari lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman (pluralitas) yang menjadi ciri khas obyektif bangsa Indonesia. Gejala tersebut dapat dilihat dari menguatnya orientasi kelompok, etnik, dan agama, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkan disintegrasi bangsa.

## **B. AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL**

Berdasarkan masalah dan tantangan pembangunan yang harus dihadapi dalam tahun 2005–2006, disusun 3 (tiga) agenda pembangunan yaitu: **MEMPERCEPAT REFORMASI; MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;** serta **MEMPERKOKOH KESATUAN DAN PERSATUAN BANGSA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.** Ketiga agenda pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam prioritas dan langkah-langkah kebijakan dalam berbagai bidang pembangunan.

### **MEMPERCEPAT REFORMASI**

Agenda mempercepat reformasi ditempuh melalui pembangunan politik, pembangunan hukum dan penyelenggaraan negara, serta pembangunan bidang-bidang terkait lainnya.

Dalam **PEMBANGUNAN POLITIK**, pemantapan kehidupan politik diprioritaskan pada **proses penyempurnaan dan penguatan kelembagaan politik** baik pada lembaga politik penyelenggara negara maupun lembaga politik kemasyarakatan termasuk hubungan antarlembaga-lembaga politik tersebut. Di samping itu, proses reformasi politik perlu mendapatkan dukungan masyarakat internasional melalui **peningkatan kapasitas politik dan hubungan luar negeri melalui penguatan diplomasi Indonesia**, serta **peningkatan kerjasama internasional** terutama untuk memperkuat posisi regional ASEAN berkaitan dengan kepentingan Indonesia dalam konstelasi dunia yang berubah. Pembangunan politik dititikberatkan pula pada **pengembangan komunikasi, informasi dan media massa** untuk menjamin transparansi dan keterbukaan informasi, kebebasan dan kedewasaan pers dan media massa sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa diperlukan untuk pengembangan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui **PEMBANGUNAN DAERAH**, otonomi daerah dimantapkan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di daerah yang meliputi lembaga pemerintah, legislatif, masyarakat, dan dunia usaha, melalui: peningkatan kemampuan aparatur dan anggota legislatif di daerah, termasuk di dalamnya peningkatan kemampuan dalam menggali potensi sumber keuangan daerah serta kemampuan teknis kemampuan pengelolaan perkotaan dan perdesaan; serta peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan penciptaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Otonomi daerah, pada hakekatnya, bukanlah eksklusivisme daerah. Dengan demikian kerjasama antardaerah justru harus didorong untuk memantapkan otonomi daerah.

Pada dasarnya Indonesia adalah Negara Hukum, yang tidak dijalankan atas dasar kekuasaan semata. Di dalam penyelenggaraannya, pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar).

**PEMBANGUNAN HUKUM** tahun 2005–2006 diarahkan untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat termasuk dunia usaha terhadap hukum terutama melalui penegakan hukum yang tegas, tidak diskriminatif, serta konsisten dengan prioritas diberikan pada 3 (tiga) masalah penting yaitu memberantas korupsi, memerangi terorisme, dan membasmi penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, ditempuh upaya-upaya pokok sebagai berikut.

*Pertama*, meningkatkan kemampuan **perencanaan hukum nasional** untuk mempercepat tersusunnya sistem hukum nasional guna menggantikan hukum kolonial sehingga dapat memberikan arah dan menjadi wadah dinamika hukum. Dengan demikian kebijakan hukum dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, terkoordinasi, serta dapat menghindari kebijakan hukum yang bersifat sementara (*ad-hoc*). *Kedua*, meningkatkan **pembinaan dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia** untuk mendukung upaya pembentukan sistem hukum nasional yang mantap, berpijak pada sistem nilai yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat serta berpihak kepada rasa keadilan masyarakat yang mengandung nilai penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keluaran dari program ini akan menjadi materi utama bagi kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, meningkatkan kemampuan **pembentukan hukum** agar terwujud perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi acuan berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Keempat*, meningkatkan **kesadaran hukum dan hak asasi manusia** baik terhadap masyarakat luas maupun para penyelenggara negara untuk menumbuhkembangkan sikap menghargai dan mematuhi hukum, mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, serta mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum yang mengaturnya dan nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia di Indonesia.

*Kelima*, meningkatkan **pelayanan dan bantuan hukum** untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum di bidang hukum termasuk pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu. *Keenam*, meningkatkan **penegakan hukum dan hak asasi manusia** dalam rangka melakukan tindakan korektif terhadap berbagai penyimpangan terhadap kaidah hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Ketujuh*, meningkatkan **pembinaan peradilan** untuk mendorong terwujudnya proses peradilan yang lebih sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang murah serta mampu menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. *Kedelapan*, meningkatkan **pembinaan aparatur dan profesi hukum** yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesional aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, petugas masyarakat, keimigrasian, perancang peraturan perundang-undangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), para praktisi hukum dan sebagainya. *Kesembilan*, meningkatkan **pembinaan sarana dan prasarana hukum** untuk mendukung bekerjanya sistem hukum nasional.

Selanjutnya seiring dengan **PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN**, upaya pemberantasan KKN juga didorong dengan menumbuhkan budaya kritis masyarakat yang akan dikembangkan secara konstruktif agar kontrol sosial dapat tumbuh secara produktif. Selain

itu, juga akan dilakukan upaya sosialisasi dan kulturisasi etika berbangsa kepada seluruh aparat penyelenggara negara dan masyarakat.

Reformasi birokrasi dipercepat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik dengan prioritas diberikan pada: pemberantasan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN; peningkatan mutu pelayanan publik; dan peningkatan kualitas penyelenggaraan negara yang mencakup sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan kapasitas sumber daya aparaturinya.

Dalam tahun 2005-2006, **PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN NEGARA** dipusatkan pada upaya: penerapan tata pemerintahan yang baik; penataan kembali kelembagaan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan pelayanan publik dan pengawasan yang transparan dan akuntabel; serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan sejahtera agar dapat membantu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan termasuk dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Agenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh dengan meningkatkan penyediaan kebutuhan bagi kehidupan rakyat serta meningkatkan pendapatan dan memperluas lapangan kerja. Pembangunan agama, sumber daya manusia, ekonomi, daerah, infrastruktur, serta bidang-bidang lain yang terkait diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, **PEMBANGUNAN AGAMA** dalam tahun 2005-2006 diarahkan pada upaya **peningkatan pelayanan kehidupan beragama** untuk memfasilitasi umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya; dan **peningkatan pemahaman, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan** bagi individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara negara. Selanjutnya pembangunan agama juga diarahkan pada upaya **peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama** dalam hidup kebersamaan yang mampu mengantisipasi secara dini kemungkinan munculnya konflik intern dan antarpemeluk agama; **peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan** bagi peserta didik; **pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan** untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat terutama yang berada di daerah perdesaan dan berlatar belakang sosial ekonomi lemah; serta **penelitian dan pengembangan agama**.

Dalam tahun 2005-2006, **PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)** diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu pelayanan sosial dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang mengikuti pembangunan wilayah dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan didasarkan pada amanat UUD 1945 pasal 31 yaitu bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan UU No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang lebih lanjut mengatur bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, terjangkau, dan terdesentralisasi melalui pendidikan formal, non formal, dan informal pada semua jenjang dan jenis pendidikan dengan prioritas utama pada upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung menjangkau layanan pendidikan sesuai potensi dan kebutuhannya yaitu penduduk miskin, anak dengan kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, tinggal di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan dan daerah konflik, serta anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, dengan memperhatikan daerah yang kinerja pendidikan dan kapasitas sumberdayanya masih rendah. Upaya ini akan dilakukan melalui: (1) peningkatan **Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** agar seluruh anak usia 7–15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidaknya-tidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat, (2) peningkatan **pendidikan anak usia dini** agar semua anak usia dini memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia dan merupakan persiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya, (3) peningkatan **pendidikan menengah** terutama dalam mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang lebih produktif dan berkualitas, (4) peningkatan **pendidikan tinggi** untuk menghasilkan lulusan yang relevan terhadap kebutuhan pasar kerja dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu berkontribusi terhadap daya saing bangsa; dan (5) peningkatan **pendidikan non formal** untuk memberikan layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Untuk mendukung upaya-upaya tersebut akan dilakukan pula: (1) **peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan** untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalismenya baik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta, (2) **peningkatan budaya baca dan pengembangan perpustakaan** untuk menciptakan masyarakat belajar, (3) **peningkatan penelitian dan pengembangan pendidikan** sebagai dasar perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pendidikan, dan (4) **pengembangan dan manajemen pelayanan pendidikan** untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan, meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga pengelola pendidikan di pusat dan daerah, mendorong penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan demokratisasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan, serta (5) **peningkatan pendidikan kedinasan** dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan dan profesionalisme pegawai dan calon pegawai negeri departemen atau lembaga pemerintah non departemen dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) diarahkan pada upaya: mendorong **difusi dan pemanfaatan iptek**, terutama teknologi tepat guna, bagi peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah;



**penelitian dan pengembangan iptek** terutama di bidang pangan, energi, dan manufaktur dengan mengembangkan berbagai bentuk skema insentif bagi terciptanya iklim dan budaya inovasi baik di sektor pemerintahan maupun industri; serta **penguatan kelembagaan iptek** dengan meningkatkan dan memperlancar transaksi hasil litbang dan meningkatkan sinergi antara kebijakan iptek dengan kebijakan industri dan kebijakan sektor lainnya yang terkait.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat bagi seluruh penduduk, terutama bagi penduduk miskin dan masyarakat rentan termasuk bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta penduduk di daerah perbatasan, perdesaan dan kumuh perkotaan. Upaya peningkatan ini dilakukan melalui peningkatan **promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; peningkatan mutu lingkungan sehat; peningkatan upaya kesehatan masyarakat; peningkatan upaya kesehatan perorangan; perbaikan gizi masyarakat; pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta pengendalian penyakit tidak menular; penyediaan dan pengendalian obat dan perbekalan kesehatan; pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya; pengembangan obat asli Indonesia (OAI); peningkatan sumber daya kesehatan termasuk peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan; peningkatan manajemen pembangunan kesehatan termasuk pengembangan sistem informasi kesehatan** serta didukung oleh **penelitian dan pengembangan kesehatan**.

Dalam pada itu pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada upaya **peningkatan kualitas tenaga kerja** sesuai keahlian, profesionalisme, dan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dinamis. Untuk itu dukungan dari program-program pelatihan yang bersifat strategis dikembangkan. Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan pasar kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri, dipersiapkan program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selanjutnya dalam rangka menjamin kualitas tenaga kerja Indonesia dilakukan standardisasi dan sertifikasi profesi yang dimaksudkan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan profesi kepada tenaga kerja yang kompeten. Upaya penting lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Indonesia adalah melakukan perumusan, penetapan, pemberlakuan, penerapan dan peninjauan kembali standar kompetensi melalui kegiatan standardisasi kompetensi tenaga kerja yang didukung oleh pembentukan lembaga/Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial melalui berbagai upaya **bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); penyelenggaraan rehabilitasi dan perlindungan bagi PMKS; pemberdayaan fakir miskin, PMKS dan komunitas adat terpencil (KAT); penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial; dan pengembangan sistem perlindungan sosial**. Dengan memperhatikan arah penanggulangan masalah sosial di atas, maka **peran dan fungsi kelembagaan serta kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial** ditingkatkan.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perempuan diselenggarakan melalui berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak dan meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender melalui **peningkatan kualitas hidup perempuan** di berbagai bidang pembangunan dan **penguatan kelembagaan**

**pengarusutamaan gender** di tingkat nasional dan daerah. Perlindungan terhadap anak dan perempuan diarahkan kepada upaya **peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dan perempuan** terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui **penyerasian kebijakan atas berbagai upaya pembangunan untuk meningkatkan kualitas anak dan perempuan**.

Pembangunan pemuda diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemuda melalui **penyerasian kebijakan kepemudaan** di tingkat nasional dan daerah; dan **pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda** di berbagai bidang pembangunan. Sedangkan pembangunan olahraga diarahkan untuk pembudayaan olahraga di kalangan masyarakat, dan dilaksanakan melalui **pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga; pembinaan dan pemasyarakatan olahraga**, termasuk **peningkatan sarana dan prasarana olahraga**.

Adapun pembangunan kependudukan dan keluarga berencana diarahkan untuk mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan **pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana**, pembinaan **ketahanan dan pemberdayaan keluarga, serta penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas**. Dengan kebijakan pembangunan daerah, persebaran dan mobilitas penduduk didorong agar lebih seimbang sesuai dengan daya dukung wilayah. Di samping itu, perlu dilakukan penyerasian kebijakan kependudukan dan penataan administrasi kependudukan.

Kualitas sumberdaya manusia juga ditingkatkan melalui **PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN**, antara lain dengan mengembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian yang beradab, serta dengan mendorong apresiasi terhadap aset budaya nasional. Budaya baca dan budaya menulis didorong guna membangun masyarakat pembaca, masyarakat belajar, dan masyarakat yang kritis sebagai basis pengembangan budaya keilmuan dan masyarakat yang cerdas, inovatif, dan produktif.

Peningkatan kesejahteraan rakyat didorong oleh **PEMBANGUNAN EKONOMI** yang diarahkan terutama untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Sasaran umum pembangunan ekonomi dalam tahun 2005-2006 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap, yaitu menjadi 5 persen pada tahun 2005 dan 5,5 persen pada tahun 2006 serta terkendalinya laju inflasi berturut-turut sekitar 6 persen dan 5,5 persen pada kurun waktu yang sama. Kualitas pertumbuhan akan ditingkatkan dengan dukungan stabilitas moneter yang terjaga agar tercipta lapangan kerja yang memadai bagi penurunan laju pengangguran serta berkurangnya jumlah penduduk miskin. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, prioritas pembangunan ekonomi diletakkan pada upaya-upaya pokok sebagai berikut.

*Pertama*, **meletakkan landasan perekonomian yang berdaya saing dan bertahan tinggi mengacu pada kepentingan nasional** dengan mendorong mekanisme pasar yang berkeadilan dan peran pemerintah yang optimal dalam mewujudkan persaingan sehat. Upaya tersebut ditempuh melalui: (a) penyempurnaan kerangka kelembagaan yang dapat menjamin sekaligus menjaga terciptanya mekanisme pasar yang sehat dan berkeadilan; (b) peningkatan ketersediaan dan keakuratan data dan informasi; (c) penghapusan hambatan-hambatan peraturan dan prosedur pusat dan daerah secara terprogram dan berkelanjutan

dalam berusaha dan kesempatan berusaha yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi; (d) peningkatan investasi yang mampu bersaing secara global; menciptakan keseimbangan wilayah, pelaku dan struktur ekonomi; serta memperkuat kelembagaan penanaman modal di pusat dan daerah; (e) penataan sistem dan penguatan kelembagaan standardisasi mutu produk; (f) peningkatan kerjasama antardaerah melalui penataan jaringan koleksi dan distribusi untuk efisiensi kelancaran arus barang dan jasa antardaerah; (g) perkuatan kelembagaan perdagangan internasional untuk merespon dinamisasi globalisasi; (h) penyederhanaan prosedur perpajakan dan kepabeanan, dan (i) penerapan kebijakan pasar tenaga kerja yang mendorong mobilitas tenaga kerja agar dapat tercipta lapangan kerja produktif yang seluas-luasnya serta mendorong agar tenaga kerja dapat berpindah dari pekerjaan yang kurang produktif ke pekerjaan yang lebih produktif.

*Kedua, mendorong pengembangan sektor riil* dengan penggerak sektor industri yang didukung oleh pemanfaatan potensi SDA secara berkelanjutan dan mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh. Upaya ini ditempuh melalui: (a) pembangunan industri berbasis sumber daya alam dan tenaga kerja nasional/lokal, sesuai dengan kompetensi dan unggulan daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; (b) perkuatan keterkaitan industri dan pertanian untuk terciptanya struktur ekonomi yang terkait secara vertikal dan horisontal dengan kokoh; (c) peningkatan produktivitas pertanian melalui penataan kelembagaan dan penguatan sistem agribisnis, serta pembangunan infrastruktur pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan; (d) peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam (kehutanan, perikanan, kelautan, jasa lingkungan, serta mineral dan pertambangan) yang efisien, optimal, dan berkelanjutan; (e) peningkatan diversifikasi pangan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri yang sesuai gizi seimbang; (f) peningkatan volume dan ragam ekspor melalui berbagai fasilitasi dan upaya pengenalan akses pasar terutama pada negara-negara tujuan yang baru; (g) peningkatan kinerja perusahaan negara terutama BUMN dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi; (h) peningkatan kualitas dan kapasitas iptek guna mendorong produktivitas dan efisiensi sistem produksi yang sesuai kebutuhan dunia usaha; (i) peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja antara lain dengan pemberlakuan dan penerapan standardisasi kompetensi tenaga kerja; (j) peletakan fondasi pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*); (k) mendorong pariwisata yang berbasis kerakyatan; (l) peningkatan produktivitas UKM antara lain melalui penciptaan iklim kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif serta pengembangan UKMK berkeunggulan kompetitif, dan (m) penumbuhan wirausaha baru yang berorientasi pada pertumbuhan dan jenis-jenis usaha inovatif, serta memanfaatkan keunggulan potensi sumber daya lokal.

*Ketiga, menjaga stabilitas moneter dan meningkatkan ketahanan sektor keuangan* yang mampu mengenali dan mencegah terjadinya krisis, serta mampu mengendalikan dampak dari krisis yang terjadi. Upaya tersebut ditempuh melalui: (a) peningkatan fungsi penyaluran dana dengan antara lain mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan sesuai mekanisme pasar, upaya pengurangan *cost of capital* dan peningkatan peran BPR untuk UKM serta pengembangan arsitektur perbankan untuk perluasan pelayanan; (b) peningkatan ketahanan lembaga keuangan dengan menyempurnakan dan melaksanakan ketentuan tingkat kesehatan lembaga keuangan yang berbasis resiko, terutama untuk perbankan dan asuransi; (c) penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yang antara lain dilakukan dengan cara memulai perbaikan *governance structure* bank-bank BUMN, meningkatkan kualitas pengawasan industri asuransi dan reasuransi, menerapkan standar-standar internasional dalam segi transparansi dan efisiensi, serta

memperkuat SDM; (d) peningkatan ketahanan pasar modal sebagai alternatif pembiayaan investasi; (e) penyusunan dan pelaksanaan mekanisme pencegahan dan pengelolaan krisis melalui pembentukan OJK dan LPS serta penetapan mekanisme pencegahan dan pengelolaan krisis yang melibatkan otoritas fiskal, otoritas moneter, otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan; (f) peningkatan ketahanan fiskal ditingkatkan dengan menurunkan secara bertahap stok utang pemerintah dan mengendalikan defisit anggaran; serta (g) reformasi sistem perpajakan untuk memperluas sekaligus menjamin keadilan terhadap obyek pajak dalam rangka meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara.

*Keempat*, **meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesempatan berusaha** yang dapat mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat, terutama bagi penduduk yang kurang mampu. Upaya ini ditempuh melalui: (a) pengupayaan peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan perluasan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas penduduk miskin serta mengurangi pengeluaran keluarga miskin untuk kebutuhan dasar yang meliputi pangan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat; (b) pemberdayaan usaha mikro dengan mengintegrasikan upaya peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka menjamin adanya pendapatan yang tetap dan pemenuhan kebutuhan setiap hari dengan upaya peningkatan kapasitas usahanya menjadi unit usaha yang lebih mapan serta nantinya siap untuk tumbuh dan bersaing, dan (c) persiapan pengembangan sistem jaminan sosial yang dapat menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan.

Peningkatan kesejahteraan rakyat didorong oleh **PEMBANGUNAN DAERAH** yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendorong pemanfaatan potensi dan kapasitas masing-masing daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan daerah tahun 2005 – 2006 diletakkan pada upaya-upaya pokok sebagai berikut.

*Pertama*, meningkatkan **penataan ruang dan pengelolaan pertanahan** yang didukung oleh penegakan hukum yang adil dan transparan dengan mempertimbangkan hak masyarakat adat; menyempurnakan sistem pendaftaran tanah, pemberian ijin, dan status ruang yang mudah diakses oleh masyarakat; meningkatkan keserasian tata ruang dan pemanfaatan tanah dengan potensi wilayah dan ekosistemnya; serta memanfaatkan rencana tata ruang sebagai acuan dan perangkat koordinasi pembangunan antar daerah dan antar sektor.

*Kedua*, mendorong **pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh** khususnya di luar Jawa terutama pada wilayah-wilayah yang mempunyai potensi sumber daya alam dan lokasi strategis untuk dikembangkan sebagai wilayah pertumbuhan antara lain dengan memfasilitasi pengembangan kawasan; mendorong industri pengolahan bahan baku di luar Jawa dengan insentif yang tepat; mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan sebagai kawasan perdagangan bebas; serta meningkatkan kerjasama pembangunan dengan negara-negara tetangga.

*Ketiga*, **mengembangkan perkotaan dan perdesaan** melalui pengendalian pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan disertai dengan upaya untuk mengoreksi eksternalitas negatif yang ada, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi yang menurunkan kualitas kawasan perkotaan; pengembangan kota-kota menengah dan kota-kota kecil; peningkatan sinergi yang saling melengkapi antara kawasan perkotaan dan perdesaan dengan fokus pada

peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat desa dan penyediaan prasarana dan sarana dasar; pengurangan kesenjangan pembangunan antara perkotaan dengan perdesaan; serta peningkatan kemandirian kota dan desa dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanannya.

*Keempat*, mendorong dan membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan berbagai upaya guna meningkatkan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah-wilayah yang masih tertinggal, termasuk wilayah yang dihuni oleh komunitas adat terasing, terutama di Kawasan Timur Indonesia, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara satu bagian wilayah negara dengan bagian wilayah negara lainnya, dan dalam merehabilitasi wilayah-wilayah yang rusak akibat konflik horizontal maupun vertikal agar kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat dapat pulih kembali dan sejajar dengan masyarakat Indonesia lainnya.

*Kelima*, **mengembangkan kerjasama pembangunan sektoral dan daerah** dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah dengan memberdayakan masyarakat miskin dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan; mengembangkan swadaya masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah sosial dan membantu masyarakat miskin dan rentan sosial; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kewirausahaan di daerah.

Dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah, **PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**, meliputi pembangunan transportasi, ketenagalistrikan, energi, telekomunikasi dan informatika, sumberdaya air, serta perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan ditingkatkan. Dalam tahun 2005 – 2006, upaya penyediaan sarana dan prasarana ini ditekankan pada pemeliharaan dan rehabilitasi pada sarana dan prasarana umum agar sarana dan prasarana yang sudah ada mampu memberi dukungan yang maksimal bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam jangka menengah, sejalan dengan meningkatnya kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah, upaya dilanjutkan dengan membangun sarana dan prasarana ekonomi pada wilayah-wilayah yang berpotensi untuk berkembang, wilayah lumbung pangan nasional, wilayah-wilayah terbelakang, dan wilayah-wilayah perbatasan. Seiring dengan itu, peranan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana ditingkatkan dengan mengurangi monopoli dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Pembangunan transportasi tahun 2005 – 2006 diarahkan pada **pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan pembangunan: jalan dan jembatan; angkutan lalu lintas jalan; angkutan kereta api; angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; angkutan laut; serta angkutan udara**. Pembangunan jalan dan jembatan akan diprioritaskan pada pemeliharaan jalan arteri primer terutama di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, dan jalan lintas selatan Kalimantan; jalan-jalan arteri primer dan strategis di kawasan perkotaan, jalan-jalan poros di perdesaan; serta pembangunan jalan baru pada daerah perbatasan dengan negara tetangga dan pulau terpencil. Pembangunan angkutan lalu lintas jalan akan diprioritaskan pada pemulihan kondisi pelayanan armada bus terutama untuk kegiatan angkutan kota sesuai dengan standar pelayanan minimal. Pembangunan angkutan perkeretaapian akan diprioritaskan pada pemulihan jasa pelayanan sarana dan prasarana kereta api ke tingkat kondisi normal yang dititikberatkan pada kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan dengan prioritas untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran operasional serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana angkutan kereta

api; penanganan masalah *backlog*; pemeliharaan sarana dan prasarana kereta api; serta pengembangan sarana dan prasarana kereta api. Pembangunan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan akan diprioritaskan pada pengembangan armada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi SDP; pengembangan sarana dan prasarana transportasi SDP; serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan di pulau-pulau kecil dan di kawasan perbatasan. Pembangunan angkutan laut akan diprioritaskan pada pengembangan armada angkutan laut nasional; rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi laut; pengembangan sarana dan prasarana angkutan laut; serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas pelayanan angkutan laut di pulau-pulau kecil terutama di kawasan perbatasan. Pembangunan angkutan udara diprioritaskan pada upaya melanjutkan kebijakan membuka pasar (*multi operator*) dengan meningkatkan pengawasan dan pembinaan keselamatan, keamanan dan pelayanan bagi setiap operator jasa transportasi udara; rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi udara; pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara; serta penyediaan sarana navigasi udara beserta fasilitas pelayanan angkutan udara di pulau-pulau kecil terutama di kawasan perbatasan.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi kegiatan ekonomi dan rumah tangga, penjualan listrik diupayakan tumbuh rata-rata sekitar 6 – 7 persen per tahun; sedangkan rasio elektrifikasi diupayakan meningkat rata-rata sebesar 1,4 persen per tahun atau menjadi 62,5 persen pada tahun 2006. Dalam kaitan itu, pembangunan kelistrikan diarahkan pada **peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana tenaga listrik** antara lain dengan rehabilitasi pembangkit, transmisi, dan distribusi terutama untuk sistem luar JAMALI dan pembangunan pembangkit untuk memenuhi kebutuhan listrik setempat; serta **peningkatan aksesibilitas pelayanan jasa listrik** baik di daerah yang jaringannya sudah terkoneksi maupun di daerah yang belum terjangkau.

Pembangunan pos dan telekomunikasi akan diprioritaskan pada penyelesaian reformasi transpostel; regulasi; pendanaan dan pembangunan yang melibatkan swasta; memperbaiki tingkat efisiensi; serta mendukung sektor-sektor lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan telematika, tingkat penetrasi sambungan tetap pada tahun 2006 diharapkan mencapai 5,8 persen; sedangkan tingkat penetrasi STB dan pengguna internet pada tahun 2006 masing-masing mencapai 14,6 persen dan 1,8 persen.

Dalam rangka pembangunan sumberdaya air terutama untuk memenuhi kebutuhan air irigasi guna mendukung ketahanan pangan nasional, **operasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi** terus diupayakan untuk mempertahankan tingkat layanan dan infrastruktur dan menghindari terjadinya rehabilitasi besar-besaran. Pelaksanaan rehabilitasi sumberdaya air terutama untuk memenuhi kebutuhan air irigasi untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional, operasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi diarahkan pada jaringan yang tidak dapat berfungsi atau fungsinya jauh menurun, terutama di wilayah lumbung padi nasional pada 13 propinsi pusat produksi beras (5 propinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan) dengan mendayagunakan sumber-sumber pendanaan dalam negeri. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menggunakan pinjaman luar negeri tetap dilanjutkan untuk mempercepat pemulihan fungsi infrastruktur irigasi. Di samping itu, pengendalian daya rusak air diarahkan dengan mengutamakan pengendalian banjir secara non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai. Untuk itu upaya penegakan hukum dan peraturan tentang sempadan sumber air harus dilaksanakan secara

efektif, di samping tetap melanjutkan rehabilitasi bangunan pengendali banjir. Sejalan dengan reformasi kebijakan sumberdaya air maka peranserta masyarakat terus ditingkatkan terutama dalam **pengelolaan infrastruktur sumberdaya air** guna menjamin keberlanjutan fungsinya.

Kesejahteraan rakyat juga ditingkatkan melalui pembangunan perumahan dan permukiman. Untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, dikembangkan sumber pembiayaan jangka panjang bagi pembangunan perumahan serta kepemilikan rumah; pembangunan rumah susun milik dan sewa; pembangunan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat; pemberdayaan komunitas permukiman untuk mendorong pembangunan perumahan swadaya; perbaikan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni; penataan kawasan kumuh; revitalisasi kawasan; dan peremajaan kawasan. Di samping itu juga dikembangkan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman dan pengembangan teknologi untuk peningkatan keselamatan umum dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan dan lingkungan. Pengertian permukiman dan perumahan layak huni mencakup terpenuhinya kebutuhan unsur-unsur permukiman dan perumahan yang meliputi jaminan hak atas tanah untuk bermukim, kualitas struktur bangunan yang memenuhi persyaratan teknis, terlayani prasarana dan sarana dasar yang meliputi jalan lingkungan dan jalan akses, jaringan air minum dan air limbah, persampahan, drainase, listrik, dan kepadatan bangunan yang masih memungkinkan tersedianya ruang publik.

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan dilakukan peningkatan penyediaan dan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan di kota-kota metropolitan, besar dan sedang serta kawasan-kawasan baru melalui peningkatan kualitas lingkungan agar dapat menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas air baku, penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang air minum dan penyehatan lingkungan; perbaikan serta peningkatan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan serta hidup secara bersih dan sehat; serta peningkatan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan melalui penyehatan lembaga-lembaga pengelola penyedia air minum yang kritis, pengembangan sumber pembiayaan alternatif bagi pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan, serta pengembangan pengelola air minum dan penyehatan lingkungan yang berbasis pengelolaan oleh masyarakat di perkotaan dan di perdesaan.

Peningkatan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari terjaminnya ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan demikian, tujuan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dapat semakin diwujudkan.

Dalam kaitan itu, **PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP** dalam tahun 2005 – 2006 diarahkan untuk memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak, mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah, dan mempertahankan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih dalam kondisi baik; melalui perbaikan faktor-faktor yang memicu terjadinya kerusakan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut prioritas pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup diletakkan pada upaya-upaya sebagai berikut.

*Pertama*, **memanfaatkan potensi ekonomi SDA**, termasuk jasa-jasa lingkungannya, secara efisien dan optimal dalam mendukung perekonomian nasional, dan sekaligus mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi yang mengarah pada penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. *Kedua*, **melindungi dan merehabilitasi SDA** agar kualitas dan daya dukungnya tetap terjaga, sekaligus menjamin tersedianya ruang yang memadai bagi kehidupan masyarakat. *Ketiga*, **mengelola SDA dan LH** yang mantap yang disertai dengan kelembagaan dan instrumen pendukung lainnya dalam memanfaatkan SDA dan perlindungan lingkungan hidup, yang berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik, termasuk dalam penegakan hukum, pengakuan hak asasi masyarakat adat dan lokal, dan perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan peran aktif dalam perlindungan lingkungan global. *Keempat*, **mengendalikan pencemaran lingkungan hidup** untuk mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. *Kelima*, **meningkatkan kualitas dan akses informasi SDA dan LH** dalam mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.

## **MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Agenda pembangunan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dijabarkan melalui pembangunan politik, pertahanan dan keamanan, budaya, serta bidang-bidang pembangunan terkait lainnya.

Dalam **PEMBANGUNAN POLITIK**, pemantapan kehidupan politik untuk menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia diprioritaskan pada **peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional** untuk menyepakati kembali makna penting persatuan dan kesatuan nasional dalam konstelasi politik yang sudah berubah. Pelembagaan penyelesaian baik konflik dan sengketa pusat dan daerah maupun konflik daera-daerah melalui cara-cara damai dan demokratis, serta peningkatan pemahaman tentang persatuan dan kesatuan nasional merupakan tantangan yang harus diwujudkan untuk meningkatkan komitmen persatuan nasional tersebut melalui rasa kebersamaan dan saling berkepentingan secara mutualistik. Di samping itu, persoalan-persoalan politik masa lalu yang telah memberikan kontribusi terhadap ancaman terhadap pemisahan diri dari NKRI perlu disikapi melalui **pelaksanaan rekonsiliasi nasional** dan **penataan otonomi daerah**. Rekonsiliasi Nasional dititikberatkan pada mempercepat upaya pelembagaan rekonsiliasi nasional serta upaya memposisikan lembaga rekonsiliasi nasional dalam penyelenggaraan negara, sedangkan Penataan Otonomi Daerah dititikberatkan pada perumusan peta politik pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemantapan kehidupan politik perlu didukung oleh **penguatan kelembagaan komunikasi dan informasi serta hubungan informasi antarlembaga**. Lembaga-lembaga komunikasi dan informasi termasuk di dalamnya lembaga sosial kemasyarakatan di bidang komunikasi dan informasi merupakan stakeholder penting untuk memperkuat dan memperkokoh NKRI.

Peningkatan persatuan dan kesatuan diarahkan pada upaya untuk tetap tegaknya kedaulatan dan terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terciptanya kondisi aman, damai, dan tertib dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan itu prioritas **PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN** diletakkan



pada penyelesaian masalah separatisme NAD dan Papua secara komprehensif. Selanjutnya pembangunan pertahanan dan keamanan tahun 2005 – 2006 diarahkan pada **pengembangan pertahanan negara** untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan; **pengembangan dukungan pertahanan** untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya nasional bagi kemampuan pertahanan negara; **peningkatan kerjasama militer internasional** untuk menciptakan perdamaian kawasan dan dunia; **penelitian dan pengembangan pertahanan** terutama di bidang industri dan teknologi pertahanan, manajemen dan organisasi, doktrin militer, dan potensi pertahanan; **pengembangan kelembagaan kepolisian** untuk meningkatkan kemampuan atau profesionalisme kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; **pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat** untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban yang mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dari gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; **pengembangan dukungan keamanan dalam negeri** untuk meningkatkan kemampuan pengamanan kedaulatan dan keutuhan wilayah serta gangguan keamanan dalam negeri dengan mendayagunakan secara optimal dan terpadu segenap komponen kekuatan keamanan negara.

Melalui **PEMBANGUNAN DAERAH**, upaya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI didorong melalui peningkatan kerjasama antar daerah serta **pengembangan kawasan perbatasan** dengan menjadikan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara sehingga terjalin hubungan yang harmonis dengan negara tetangga serta dengan menggali potensi ekonomi, sosial, dan budaya, serta potensi lokasi perbatasan.

Dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, **PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN** diarahkan pada penguatan jati diri bangsa, pengelolaan keragaman budaya, dan pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan. Pengembangan jatidiri bangsa Indonesia terutama akan dilakukan melalui *nation and character building* berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan menerapkan format dan metode yang tepat disesuaikan dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. **Pengelolaan keragaman budaya** ditujukan selain untuk mengembangkan budaya lokal dan interaksi harmonis-produktif antar unit budaya, juga untuk memupuk dan memperkuat perasaan dan semangat keIndonesiaan. Untuk itu juga akan dilakukan upaya pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan baik yang bersifat normatif maupun pragmatis.

Upaya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa juga didukung oleh **PEMBANGUNAN AGAMA** yang diarahkan untuk mempererat kerukunan hidup intern dan antar umat beragama serta membangun harmoni sosial dan persatuan nasional.

Dalam mendukung upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan pendidikan akan mengembangkan pendidikan multikultural yang terintegrasi ke dalam kompetensi materi-materi pelajaran dan proses pembelajaran yang relevan untuk memantapkan wawasan kebangsaan dan memperkuat pemahaman nilai-nilai pluralis, toleransi, dan inklusif guna meningkatkan daya rekat sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu pembangunan pendidikan akan dilakukan secara lebih terdesentralisasi, berkesinambungan, dan adil guna menurunkan perbedaan tingkat pembangunan antardaerah dan antarkelompok masyarakat.